

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk kedalam negara yang berkembang. Hal tersebut menjadikan Indonesia dituntut untuk dapat mengembangkan potensi sumber daya manusia serta sumber daya alam yang dimilikinya dengan semaksimal mungkin agar negaranya dapat berkembang lebih pesat lagi ke arah yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Sumber daya manusia sendiri dapat dimanfaatkan serta ditingkatkan melalui berbagai cara, salah satunya yaitu melalui kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi masyarakatnya. Dikarenakan semakin berkembangnya zaman akan menimbulkan era baru yang membutuhkan penyesuaian dari sumber daya manusianya. Keterlibatan sumber daya manusia ini dibutuhkan untuk mengimbangi perkembangan yang ada, dikarenakan dengan adanya era baru ini kompetisi global serta kompetisi bebas antar manusia akan semakin sering terjadi. Kompetisi ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam meningkatkan kompetensi dari setiap individunya.

Berdasarkan data BPS 2022 menunjukkan bahwasanya kualitas SDM di Indonesia sendiri masih termasuk kedalam golongan rendah. Hal ini dibuktikan dengan tenaga kerja yang ada diisi oleh banyak tamatan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD) dengan angka sebesar 39,10 persen. Salah satu faktor yang dapat digunakan dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu melalui pendidikan serta pelatihan yang disesuaikan dengan perubahan sosial dan masyarakatnya. Kualitas sumber daya manusia di berbagai sektor di Indonesia tentu berbeda satu sama lain, tetapi dapat digaris bawahi bahwasanya kualitas SDM juga bisa ditinjau berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh individu. Salah satunya yaitu SDM dalam sektor kesehatan, dilihat dari Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2018 dijelaskan bahwasanya terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu terkait tata kelola klinis yang belum maksimal, kepatuhan tenaga kesehatan terhadap standar pelayanan dan pencatatan serta pelaporan yang belum optimal.

Nadia Muliawati, 2023

PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN STUDI KASUS (CASE STUDY) DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI PELAYANAN TENAGA KESEHATAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Permasalahan yang dihadapi oleh tenaga kesehatan tentu menjadi sebuah tanda khusus untuk melaksanakan perbaikan dan peningkatan kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kesehatan. Karena pada dasarnya sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 pasal 60 menjelaskan bahwasanya tanggung jawab dari tenaga kesehatan yaitu mengabdikan kepada masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki, meningkatkan kompetensi individu, bersikap serta berperilaku sesuai dengan etika profesi, mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi ataupun kelompok, dan juga dapat melakukan kendali mutu pelayanan serta kendali biaya dalam penyelenggaraan upaya kesehatan.

Pemerintah Indonesia saat ini sedang gencar dalam melaksanakan perbaikan serta peningkatan kualitas SDM, dikarenakan dengan menumbuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dapat dijadikan sebagai acuan utama dalam meraih sebuah tujuan pembangunan nasional yang dapat bersaing dengan segala aspek bidang, dengan kualitas SDM yang berkualitas kehidupan masyarakat serta roda perekonomian akan bergerak mengalami peningkatan. Salah satu bentuk pemerintah melaksanakan perbaikan dan peningkatan kualitas SDM dapat dilihat dengan pelaksanaan pelatihan dan juga pendidikan yang diadakan oleh lembaga-lembaga yang ada dibawah naungannya, salah satunya yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang melaksanakan pelatihan serta pendidikan untuk SDM yang dimilikinya. Hal tersebut termuat pada Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72 tahun 2011 terkait organisasi dan tata kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pasal 1 yang menyebutkan bahwasanya BKKBN mempunyai salah satu fungsi yaitu menyelenggarakan pelatihan, pengembangan, dan pelatihan di bidang pengendalian penduduk serta penyelenggaraan keluarga berencana. Salah satu perwujudan fungsinya yaitu dengan mengadakan pelatihan guna peningkatan kompetensi tenaga kesehatan yang terstandarisasi berdasarkan panduan serta peraturan pemerintah dalam memberikan pelayanannya pada masyarakat.

Lembaga pemerintah yang berwenang dalam meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kesehatan yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional (BKKBN). BKKBN telah merencanakan banyak program yang berkaitan dengan kependudukan serta peningkatan kualitas penduduk salah satunya melalui generasi muda (Susanti, 2015, hlm. 247). Dalam perwujudannya pelatihan serta pendidikan yang dilakukan oleh balai diklat BKKBN yaitu pelatihan program KKB bagi kader, pelatihan IUD, pelatihan program GENRE, pelatihan pendidik sebaya dan konselor sebaya, pelatihan pelayanan kontrasepsi dan lain sebagainya. Dapat dijabarkan bahwasanya salah satu pelatihan yaitu pelatihan pelayanan kontrasepsi ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia atau yang dapat kita sebut sebagai tenaga kesehatan agar kompetensi pelayanannya sesuai dengan standar yang ada dalam memberikan pelayanan mengenai kontrasepsi bagi masyarakat awam.

Salah satu bagian daripada pendidikan non formal yang mewadahi kebutuhan dari masyarakat di era digital saat ini, yaitu adanya pelatihan. Pelatihan merupakan usaha yang dilakukan guna memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Pelatihan banyak diadakan oleh lembaga formal atau lembaga dibawah naungan kedinasan, lembaga non formal bahkan perusahaan. Pelaksanaan pelatihan dilakukan oleh lembaga untuk memperbaiki bahkan meningkatkan kinerja para tenaga kerjanya.

Pelatihan merupakan bagian daripada pendidikan sepanjang hayat yang mana proses pelaksanaan pendidikan tersebut tidak dibatasi oleh waktu, tempat, maupun usia. Saepudin, Asep, Mulyono (2019, hlm. 66) menyebutkan bahwa *“Lifelong education (lifelong learning) is a statement and conviction that in the process of the journey of human life cannot be separated from the process of learning and learning. Humans will continue to learn, since in the womb until later toward the time to the grave”*. Oleh karena itu, pendidikan sepanjang hayat atau *lifelong learning* memberikan kesempatan kepada semua manusia untuk selalu belajar dimanapun dan kapanpun, karena dalam kenyataannya pendidikan dapat diambil dari mana saja karena selama kita menjalani kehidupan tentu tidak terlepas dari adanya proses belajar mengajar.

Penelitian yang dilaksanakan oleh BKKBN di Indonesia dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2022 mengenai pelatihan, menunjukkan hasil yang memuaskan keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh adanya intruksi kurikulum pusat, dengan pengembangan model serta metode pembelajaran yang menyesuaikan dengan daerah dan teori yang ada. Salah satunya yaitu penggunaan model pembelajaran *blended learning* dengan memanfaatkan *WhatsApp Grup* serta *Zoom Meeting* sebagai sarannya (Rinaldy & Siska, 2022; Sanjani, 2018).

BKKBN Jawa Barat mengadakan pelatihan mengenai layanan kontrasepsi untuk dokter serta bidan sebagai upaya peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan keluarga berencana (KB) yang terstandarisasi di layanan kesehatan, pelatihan tersebut diadakan dibawah naungan langsung Balai Diklat BKKBN Jawa Barat dengan turut serta mengundang fasilitator yang mumpuni dibidangnya serta menerapkan sistem pembelajaran *blended learning* dengan pelatihan *online* serta *offline*.

Kegiatan pelatihan yang diadakan oleh balai diklat BKKBN provinsi Jawa Barat sesuai dengan konsep pendidikan masyarakat yang mengembangkan pendekatan lebih canggih salah satunya melalui *blended learning*, karena harus mempersiapkan manusia menghadapi kehidupannya sendiri serta mendorongnya menjadi pemimpin dalam perubahan kualitas hidup yang lebih baik pada individu (Saepudin, Asep., Mulyono, 2019, hlm.68).

Pelatihan tersebut dilakukan untuk mewujudkan keluarga berencana melalui salah satu pelayanan yaitu pelayanan kontrasepsi. Untuk mewujudkan keluarga berencana, pemerintah selaku *policy maker* sudah berusaha menciptakan berbagai macam kebijakan yang akhirnya dikeluarkan menjadi berbagai macam program keluarga berencana yang dimaksudkan untuk mengurangi masalah kependudukan yang ada dalam masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam menyelesaikan permasalahan pertumbuhan penduduk yaitu melalui peningkatan pelayanan program KB. Program KB ialah program yang dibuat oleh pemerintah, program berisi berbagai kegiatan medis seperti halnya pemasangan serta pelepasan alat kontrasepsi KB dan juga terdapat berbagai

penyuluhan yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi, dalam program KB terdapat juga pelayanan untuk masyarakat yang ingin berkonsultasi terkait masalah kesehatan yang dialami (Trianziani, 2018, hlm. 134). Kegiatan tersebut dilakukan guna mengatasi permasalahan pertumbuhan penduduk serta permasalahan kesehatan yang ada pada masyarakat.

Berdasarkan data evaluasi yang diperoleh dari laporan Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi Angkatan III didapatkan:

Tabel 1.1 Hasil Evaluasi Peserta

No	Hasil Evaluasi	Terkecil	Terbesar	Rata-Rata
1	<i>Pretest</i>	50	93,33	65,73
2	<i>Posttest</i>	86,67	100	96,27
3	Penugasan	77	100	90,69
4	Kehadiran	92,85	100	99,57
5	Keaktifan/ Partisipasi	65,40	98,80	81,55
6	Penilaian Akhir	92,73	97,42	96,03

Sumber: Laporan Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi di Balai Diklat BKKBN Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

Dari hasil evaluasi peserta pelatihan pelayanan kontrasepsi angkatan III dapat disimpulkan bahwa nilai peserta untuk kenaikan *pre/posttest* adalah 30,54 atau ada kenaikan sebesar 46,46 % yang cukup signifikan. Sehingga secara keseluruhan nilai rata-rata akhir peserta adalah 96,03. Nilai akumulasi terendah peserta adalah 92,73 (nilai terkecil) dan 97,42 (nilai terbesar) serta semua peserta dinyatakan lulus (batas terendah kelulusan adalah nilai 80). Dari keseluruhan proses kegiatan yang ada dalam pelatihan, dilakukan evaluasi kepada peserta dengan presensi kehadiran peserta 100% kemudian setelah pelaksanaan pemberian teori dan penugasan secara daring dan klasikal serta praktek lapangan di RS Harapan Keluarga, pelaksanaan *posttest* dan penilaian penugasan, praktek lapangan, sikap dan kedisiplinan peserta. Adanya nilai kenaikan antara *pretest* dengan *posttest* menjadi salah satu indikator bahwa pelatihan yang diadakan oleh balai diklat BKKBN dapat meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan peserta.

Berdasarkan temuan lapangan serta data hasil evaluasi pelatihan kontrasepsi angkatan III didapatkan bahwasanya terdapat peningkatan kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kesehatan setelah mendapatkan pelatihan mengenai pelayanan kontrasepsi ini dilihat dari adanya perubahan hasil *pretest* serta *posttest* dimana nilai peserta mengalami kenaikan setelah mendapatkan pelatihan, peserta didik mampu melakukan penyelesaian permasalahan melalui metode pembelajaran studi kasus, serta adanya perubahan perilaku praktik pelayanan kontrasepsi. Tentu saja hal ini akan berakibat baik kedepannya jika tenaga kesehatan sudah mendapatkan pelatihan-pelatihan yang terstandarisasi. Peningkatan kompetensi tersebut tentunya dipengaruhi juga oleh aspek yang berhubungan dengan model pembelajaran serta metode pembelajaran yang diaplikasikan dalam pelaksanaan pelatihannya. Dalam pelaksanaan pelatihan ini, penyelenggara menyiapkan modul dan bahan ajar, pedoman pelayanan kontrasepsi, Kohurt, buku petunjuk, bahan praktik, persiapan *learning management system* (kelas LMS yang mencakup daftar hadir, penugasan), evaluasi bagi peserta, fasilitator, penyelenggara dan MOT, materi, biodata, form penilaian peserta, lokasi serta dukungan transportasi.

Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan dalam pelatihan pelayanan kontrasepsi oleh Balai Diklat BKKBN Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan menggunakan model serta metode pembelajaran yang disesuaikan dengan peserta pelatihan dan juga didasarkan kepada prosedur pelatihan dari pusat. Dapat dijelaskan lebih lanjut bahwasanya metode pembelajaran ialah tahapan atau cara yang digunakan dalam hubungan antara peserta didik serta pendidik guna meraih tujuan pembelajaran yang sebelumnya sudah direncanakan sesuai dengan materi serta alur mekanisme pembelajaran daripada metode pembelajaran (Afandi, dkk, 2013, hlm.16). Salah satu metode pembelajaran yang digunakan oleh Balai Diklat BKKBN provinsi Jawa Barat dalam pelatihan kontrasepsi angkatan III yaitu menggunakan metode pembelajaran studi kasus. Kegiatan tersebut sesuai dengan teori Vygotsky yang menyebutkan bahwasanya proses belajar mengajar dapat terjadi apabila anak belajar ataupun bekerja dalam menangani penugasan yang belum dipelajarinya tetapi masih berhubungan dengan ranah kemampuan atau disebut sebagai *zone of proximal*

development. Dalam penerapannya biasanya menggunakan studi kasus dalam proses pengajaran. Metode pembelajaran studi kasus ini merupakan metode pembelajaran dimana pengajar biasanya memberikan sebuah kasus kepada peserta didik untuk dicari penyelesaian terbaiknya, biasanya pelaksanaan metode pembelajaran studi kasus dilakukan dengan membagi kelompok kecil yang berangotakan 4-5 orang peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam kasus yang diberikan sesuai dengan panduan penugasan dan diakhiri oleh adanya umpan balik serta masukan daripada fasilitator pelatihan.

Metode pembelajaran studi kasus dapat diterapkan pada peserta didik, jika sebelumnya peserta didik sudah memiliki pengetahuan dasar mengenai permasalahan. Dalam kehidupan manusia sebagai seorang individu maupun makhluk sosial tentu saja menemukan berbagai macam kasus yang harus dihadapi dan diselesaikan. Metode studi kasus menimbulkan adanya penetapan masalah, investigasi, serta persuasi yang harus dilakukan oleh peserta didik. Oleh karena itu, salah satu elemen utama dalam metode pembelajaran studi kasus yaitu proses diskusi yang dilakukan secara kolaboratif. Melalui diskusi tersebut, peserta didik dapat mengidentifikasi apa saja yang sebelumnya mereka ketahui serta apa saja yang harus mereka pecahkan dengan tujuan akhir yaitu untuk dapat memahami kasus serta menetapkan permasalahan untuk diinvestigasi. Melalui diskusi kolaboratif pada studi kasus, peserta didik dapat berhubungan dengan peserta didik lainnya (teman sekelompok) dalam menerapkan langkah-langkah pembelajaran studi kasus. Terutama ketika peserta didik sedang berada dalam tahap pemecahan masalah serta pengambilan keputusan, interaksi antar peserta didik sangat dibutuhkan (Anggraeni, 2020, hlm. 187). Sesuai dengan pemaparan konsep metode pembelajaran studi kasus, dalam pelaksanaan penggunaan metode studi kasus dalam pelatihan pelayanan kontrasepsi oleh Balai Diklat BKKBN Provinsi Jawa Barat sendiri yaitu dengan membagi kelompok kemudian diberikan suatu kasus untuk didiskusikan dalam kelompok penyelesaiannya dan dilaporkan kemudian fasilitator akan memberikan umpan balik terhadap hasil diskusi diakhir pembelajarannya. Berdasarkan gambaran tersebut, metode pembelajaran studi kasus merupakan

salah satu pendekatan yang menekankan kepada partisipasi aktif peserta didik dalam menghubungkan materi dengan fenomena dalam dunia nyata atau disebut juga dengan pendidikan dan pembelajaran kontekstual atau CTL. Pelaksanaan pembelajaran metode studi kasus dapat disebut sebagai bentuk sebuah pencarian (*inquiry*) yang nantinya ditujukan kepada penyelesaian kasus atau masalah. Metode pembelajaran sangat berkaitan antara satu dengan lainnya serta dapat disebut dengan pembelajaran pemecahan masalah (*problem solving teaching-learning*), bahkan lingkup dari studi kasus dapat lebih luas (Arum, 2014, hlm. 178).

Pelaksanaan metode pembelajaran studi kasus yang diterapkan oleh Balai Diklat BKKBN Provinsi Jawa Barat dalam pelatihan pelayanan kontrasepsi dilakukan dalam 7 pertemuan dari total 13 pertemuan. Pelaksanaan metode pembelajaran studi kasus tersebut dilakukan dengan 3 garis besar. Pertama, *problem-posing* yang diisi kegiatan mengenali potensi permasalahan, memikirkan keterkaitan dan mendefinisikan ruang lingkup masalah, mengidentifikasi bahan, mendefinisikan masalah lebih lanjut melalui konsultasi dengan rekan kelompok. Kedua, *problem-solving* yang diisi dengan mencari sumber referensi tambahan, mengolah informasi, mendefinisikan masalah lebih lanjut, merancang dan melakukan penyelidikan, menyiapkan informasi berupa penyajian data hasil temuan. Ketiga, *peer-persuasion* yang diisi dengan penyampaian kesimpulan atau pelaporan, pengembangan analisis ilmiah atau laporan diskusi kelompok, melakukan perdebatan (timbang balik), dan menyampaikan kesimpulan.

Tenaga kesehatan mempunyai fungsi penting terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang ada. Sementara itu kualitas pelayanan yang baik bisa didapatkan dari adanya peningkatan kompetensi yang dimiliki oleh individunya. Kompetensi pelayanan harus dilakukan sesuai dengan standarisasi yang ada. Oleh karenanya, sangat diperlukan pelatihan yang menggunakan metode pembelajaran yang efektif guna perbaikan serta peningkatan kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kesehatan. Berdasarkan uraian diatas, peneliti terdorong untuk meneliti lebih lanjut mengenai gambaran dari penggunaan metode pembelajaran studi kasus dalam meningkatkan kompetensi pelayanan tenaga

kesehatan pada program pelatihan pelayanan kontrasepsi yang diadakan di Balai Diklat BKKBN Jawa Barat, yang diharapkan dapat menjadi suatu gambaran informasi mengenai penggunaan metode pembelajaran dimasa yang akan mendatang. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul penelitian **“Penerapan Metode Pembelajaran Studi Kasus (*Case Study*) dalam Meningkatkan Kompetensi Pelayanan Tenaga Kesehatan (Studi pada Program Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi Angkatan III di Balai Diklat BKKBN Provinsi Jawa Barat)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka identifikasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *problem-posing* pada metode pembelajaran studi kasus di pelatihan pelayanan kontrasepsi Balai Diklat BKKBN Provinsi Jawa Barat dilaksanakan dengan perencanaan oleh penyelenggara program melalui pengenalan potensi permasalahan serta membuat desain kasus.
2. Pelaksanaan *problem-solving* pada metode pembelajaran studi kasus di pelatihan pelayanan kontrasepsi Balai Diklat BKKBN Provinsi Jawa Barat dilaksanakan dengan penyelesaian kasus oleh peserta didik melalui diskusi kelompok, mencari referensi tambahan, mengolah informasi, serta penyajian data hasil temuan.
3. Pelaksanaan *peer-persuasion* pada metode pembelajaran studi kasus di pelatihan pelayanan kontrasepsi Balai Diklat BKKBN Provinsi Jawa Barat dilaksanakan dengan menyampaikan kesimpulan hasil temuan, penyampaian laporan diskusi kelompok, diskusi, dan penguatan oleh pemateri.
4. Adanya peningkatan skor hasil *pretest* serta *posttest* berdasarkan laporan hasil evaluasi peserta didik pada pelatihan pelayanan kontrasepsi di Balai Diklat BKKBN provinsi Jawa Barat, dengan indeks peningkatan sebesar 46,46%.
5. Peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan pada studi kasus yang diberikan oleh penyelenggara program pelatihan pelayanan kontrasepsi di Balai Diklat BKKBN provinsi Jawa Barat.

6. Adanya perubahan perilaku praktik layanan kontrasepsi dari peserta didik pada program pelatihan pelayanan kontrasepsi di Balai Diklat BKKBN provinsi Jawa Barat.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan metode pembelajaran studi kasus (*case study*) pada program pelatihan pelayanan kontrasepsi di Balai Diklat BKKBN Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana peningkatan kompetensi pelayanan peserta didik pada program pelatihan pelayanan kontrasepsi dengan menerapkan metode pembelajaran studi kasus (*case study*) di Balai Diklat BKKBN Provinsi Jawa Barat?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat penerapan metode pembelajaran studi kasus (*case study*) dalam program pelatihan pelayanan kontrasepsi di Balai Diklat BKKBN Provinsi Jawa Barat?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan penerapan metode pembelajaran studi kasus (*case study*) pada program pelatihan pelayanan kontrasepsi di Balai Diklat BKKBN Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mendeskripsikan peningkatan kompetensi pelayanan peserta didik pada program pelatihan pelayanan kontrasepsi dengan menerapkan metode pembelajaran studi kasus (*case study*) di Balai Diklat BKKBN Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat pada penerapan metode pembelajaran studi kasus (*case study*) dalam program pelatihan pelayanan kontrasepsi di Balai Diklat BKKBN Provinsi Jawa Barat.

1.5 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai penggunaan metode pembelajaran studi kasus pada pelatihan kontrasepsi dalam meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai titik awal penelitian lebih lanjut oleh peneliti selanjutnya setelah mendapatkan gambaran konsep, wawasan serta teori dalam penelitian ini.
3. Bagi lembaga Balai Diklat BKKBN Provinsi Jawa Barat, dari hasil penelitian ini dapat mengetahui keefektifan mengenai penerapan metode pembelajaran studi kasus yang telah digunakan dalam penyelenggaraan pelatihan.

1.6 Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi skripsi didasarkan kepada Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 7867/UN40/HK/2021 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Perguruan Tinggi Indonesia Tahun Pendidikan 2021, sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisikan Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian serta Sistematika atau Struktur Skripsi.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan kajian pustaka yang dijadikan sebagai landasan teori yang nantinya dipergunakan pada analisis pembahasan terkait permasalahan dalam penelitian. Teori yang digunakan yaitu Konsep Pengembangan SDM, Konsep Pelatihan, Kosep Metode Pembelajaran, Konsep Kompetensi, serta Konsep Kompetensi Pelayanan.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisikan tahapan yang berurutan mengenai alur penelitian yang dilakukan peneliti serta metode penelitian yang digunakan meliputi Desain Penelitian, Partisipan dan Tempat Penelitian, Pengumpulan Data, dan Analisis Data.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisikan hasil temuan penelitian guna menjawab pertanyaan penelitian yang sebelumnya sudah dirumuskan.

5. BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Bab ini berisikan simpulan, implikasi serta rekomendasi dengan menampilkan penafsiran dan juga pemaknaan peneliti pada hasil analisis penelitian serta menunjukkan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian yang dilakukan.